

ALTERNATIF KEBIJAKAN DALAM PENGELOLAAN DANA DESA PADA PEMERINTAH DESA MEDEWI, KABUPATEN JEMBRANA PROVINSI BALI

I Putu Dharmanu Yudartha¹

¹Universitas Udayana Jalan PB Sudirman (Kampus Sudirman), Denpasar Bali, Indonesia

Email: ¹p_dharmanu@unud.ac.id

ABSTRAK. Desa Medewi menjadi salah satu desa yang memiliki potensi besar yang belum dikembangkan secara optimal, padahal dari sisi penerimaan dana desa tergolong tinggi. Selain dari penilaian indeks desa membangun menunjukkan dalam empat tahun, peningkatan pembangunan desa kurang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan dalam pengelolaan dana desa dan memberikan rekomendasi kebijakan pada Desa Medewi. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *mix methods*, yaitu menggabungkan penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa skala kepuasan dan manfaat dari pengelolaan dana desa di Desa Medewi sudah Baik tetapi ada beberapa indikator yang perlu ditingkatkan pengembangan potensi desa. Variabel yang masih lemah dalam memberikan kebermanfaatan dan kepuasan adalah variabel lingkungan dan perekonomian. Pengelolaan dana desa belum sinergi dengan potensi Desa Medewi, seperti sektor pertanian belum dioptimalkan, Badan Usaha Milik Desa hanya jual beli hasil pertanian dan belum adanya produk olahan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. Peneliti menganalisis ada beberapa kebijakan sebagai bentuk alternatif yang dapat diimplementasi di Desa Medewi. *Pertama*, Peningkatan kemudahan akses modal usaha di Sektor pariwisata dan pertanian oleh pemerintah desa. *Kedua*, meningkatkan intensitas pembinaan masyarakat dalam pengolahan sektor pertanian dan perikanan. *Ketiga*, Pengembangan sector pariwisata berbasis Ekowisata di beberapa obyek wisata. Alternatif kebijakan yang ideal untuk diimplementasikan dalam sebagai prioritas adalah pembinaan masyarakat dalam pengolahan sektor pertanian dan perikanan. Pemilihan kebijakan tersebut berdasarkan dampak kebijakan yang signifikan dan relevan dalam meningkatkan perekonomian desa terutama di tengah situasi pandemi Covid-19.

Kata Kunci: Kebijakan, Dana Desa, Potensi Desa.

ALTERNATIVE POLICIES IN VILLAGE FUND MANAGEMENT IN MEDEWI VILLAGE GOVERNMENT, JEMBRANA REGENCY OF BALI PROVINCE

ABSTRACT. Medewi village is one of the villages with great potential that has not been developed optimally, whereas village fund receipts are relatively high. Aside from assessing the village building index showed in four years, the increase in village development was less significant. This study aims to analyze problems in village fund management and provide policy recommendations. The method in this study uses a mixed-methods approach, which combines quantitative research and qualitative research. This study shows that village fund management's scale of satisfaction and benefits is good. However, several indicators need to be improved the development of village potential. Variables that are still weak in providing help and satisfaction are environmental and economic. Researchers analyze several policies as an alternative form that can be implemented in Medewi Village. First, the Village Government has increased access to business capital in the tourism and agriculture sector. Second, Community development in the processing of agricultural and fishery industries. Third, Ecotourism Development in several tourism objects. The ideal policy alternative to be implemented as a priority in community development is processing the agricultural and fishery sectors. The policy selection is based on significant and relevant policy impacts on improving the village economy, especially amid the Covid-19 pandemic.

Key Words: Policy, Village Fund, Village Potential.

PENDAHULUAN

Otonomi desa memberikan peluang dan ruang yang besar bagi pemerintah desa untuk mengelolaa desa secara mandiri. Posisi desa dalam konteks otonomi desa menjadi bagian penting, tidak hanya dalam mewujudkan visi dan misi Presiden tetapi juga menjadi sentral pembangunan mendampingi pemerintah daerah. Hal ini diperkuat dengan munculnya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dimana menempatkan desa tidak lagi menjadi obyek pembangunan tetapi lebih menjadi organisasi campuran antara pemerintahan lokal dengan masyarakat berpemerintahan (Sutoro dkk, 2014). Peran serta masyarakat desa dengan pemerintah desa dan kepala desa adalah suatu kesatuan dan saling tersinergi dalam membangun desa kedepannya.

Otonomi desa menjadi realitas atas pembangunan dari pinggiran yang menjadi misi pemerintahan Presiden Joko Widodo yang teraktualisasi melalui tranfer ke daerah dalam bentuk dana desa (Meutia, 2017). Dana desa merupakan bentuk aktualisasi kebijakan otonomi desa, berupa tranfer ke setiap desa yang bersumber dari dana APBN. Pada tahun anggaran 2019, negara mengalokasi sekitar Rp70 triliun dana desa, kemudian pada tahun 2020 pemerintah berencana meningkatkan menjadi Rp72 triliun (Tulus, 2019). Hal sebagai bentuk komitmen yang tinggi dari pemerintah menjadi desa-desa di seluruh Indonesia sebagai pendorong pembangunan nasional kedepannya.

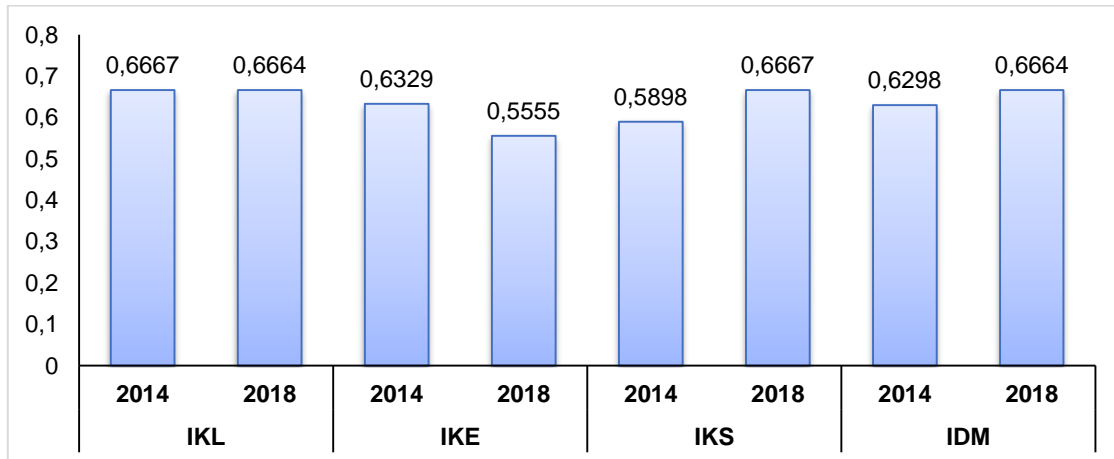
Perspektif pembangunan desa dalam bingkai otonomi desa menjadi sesuatu yang menarik untuk menganalisa kinerja pemerintah desa (Sidik, 2015).

Pembangunan desa di Bali cenderung mengalami ketimpangan, khususnya bagi desa-desa di wilayah utara Bali. Perkembangan dan kemajuan pemerintahan desa dari aspek dimensi-dimensi pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun pelaksanaan otonomi desa menimbulkan perbedaan yang cukup signifikan. Jika dilihat dari status desa berdasarkan indeks desa membangun maka di kabupaten pada Bali Utara dan sekitarnya belum mampu menghasilkan desa yang berstatus desa mandiri. Hal tersebut terjadi pada Kabupaten Buleleng, Karangasem, Klungkung dan Jembrana. Salah satu Kabupaten yang memiliki potensi untuk menjadi desa kategori mandiri adalah Kabupaten Jembrana. Kabupaten Jembrana menjadi salah satu potensi pariwisata yang layak dikembangkan, apalagi secara strategis berada pada jalur utama dan pintu masuk Pulau Bali dari Pulau Jawa, kemudian memiliki potensi sektor pertanian yang mampu bersaing terutama di komoditi kelapa dan cacao. Desa Medewi di Kabupaten Jembrana menjadi salah satu desa yang memiliki potensi yang besar.

Desa Medewi memiliki peluang yang besar untuk menjadi desa yang berstatus mandiri jika mampu mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki. Desa Medewi sudah cukup terkenal bagi wisatawan asing terutama yang hobi berselancar. Keberadaan Pantai Medewi menjadi primadona sejak tahun 1972 ketika ditemukan oleh John Davied, sebagai tempat surfing dengan ombaknya yang bagus dan besar (Ardianti, 2017). Salah satu indikator dalam menilai kinerja pemerintah desa Medewi adalah melalui indeks desa membangun (IDM) (Lihat Gambar 1).

Alternatif Kebijakan Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Pemerintah Desa Medewi, Kabupaten Jembrana
Provinsi Bali

(I Putu Dharmanu Yudartha)



Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Jembrana, 2019.

Gambar 1. Perkembangan Indeks Desa Membangun pada Desa Medewi 2014- 2018

Mengukur indek desa membangun, terdapat tiga komponen penting yaitu indeks ketahanan lingkungan, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan sosial. Data diatas menunjukkan bahwa indeks ketahanan lingkungan dan ekonomi mengalami penurunan. Hal ini menjadi problematika yang harus segera diantisipasi melalui peningkatan ekonomi masyarakat desa dan ketahanan lingkungan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menganalisis potensi-potensi yang dimiliki di desa Medewi agar mampu meningkatkan

ekonomi dan ketahanan lingkungannya. Pengelolaan dana desa menjadi pilihan yang tepat dalam menghasilkan kebijakan-kebijakan dalam memperkuat ekonomi dan ketahanan lingkungan di Desa Medewi. Pada tahun 2020, terjadi perubahan prioritas dalam pengelolaan dana desa yang dimuat dalam Peraturan Menteri Desa No. 6 Tahun 2020. Adapun prioritas pengelolaan dana desa yang dimaksud disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Prioritas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021

Prioritas Bidang Pembangunan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa	Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pengelolaan Dana Desa
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana desa	1. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar
2. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar	2. Pengelolaan sarana prasarana desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi desa	3. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup	4. Penguatan dan fasilitasi masyarakat desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya
5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam, nonalam dan/atau kejadian luar biasa lainnya	5. Pelestarian lingkungan hidup
	6. Pemberdayaan masyarakat desa untuk memperkuat tata kelola desa yang demokratis dan berkeadilan sosial

Sumber: Peraturan Kementerian Desa, 2020

Data di Tabel 1 menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa sangat terbuka dalam memaksimalkan potensi setiap desa. Oleh karena itu, pemerintah desa harus mampu melakukan analisis potensi unggulan dalam meningkatkan perekonomian desa serta berdampak pada peningkatan pendapatan desa nantinya. Hal ini juga diperkuat secara konseptual bahwa dana desa harus sinergi dengan potensi desa, karena dana desa

secara filosofis bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa, dalam bidang ekonomi desa, kesenjangan pembangunan, pelayanan publik dan subyek pembangunan oleh masyarakat (Ramly & Mursyida, 2017). Adanya dana desa seharusnya semakin meningkatkan pembangunan desa secara kesinambungan yang bersifat partisipatif. Pengelolaan dana

Alternatif Kebijakan Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Pemerintah Desa Medewi, Kabupaten Jembrana
Provinsi Bali

(I Putu Dharmanu Yudartha)

desa harus sejalan dengan prinsip partisipatif, yaitu mulai dari perencanaan, implementasi dan evaluasi kegiatan harus melibatkan masyarakat desa secara langsung.

Penilaian terhadap kinerja pengelolaan dana desa juga sangat perlu dalam perspektif masyarakat desa untuk menghasilkan penilaian yang komprehensif nantinya. Penilaian tersebut menjadi acuan peneliti dalam merancang alternatif-alternatif kebijakan publik. Perumusan kebijakan publik akan melihat dan menilai alternatif-alternatif kebijakan. Pertimbangan dalam memilih alternatif kebijakan menurut Patton & Sawicky *dalam* Mualim, 2010) adalah sebagai berikut:

- a. *Technical Feasibility*. *Technical feasibility* mengukur apakah keluaran (*outcome*) dari kebijakan atau program dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Dengan kata lain, apakah alternatif yang dipilih akan jalan dalam konteks? Misalnya, apakah program pembangunan jembatan disuatu tempat akan dapat memecahkan kesulitan trafik ditempat itu? Dalam kaitan dengan kriteria teknis ini, ada dua sub kriteria pokok yang perlu dibahas yaitu *effectiveness* dan *adequacy*.
- b. *Economic and Financial Possibility*. Kriteria ini menyangkut evaluasi ekonomis dari policy atau program yang ada, dan meliputi aspek *change in net work*, *economic affeciency*, *profitability*, dan *cost-effectiveness*.
- c. *Political Viability*. Kriteria politik menyangkut lima sub kriteria yang perlu dipertimbangkan, yaitu

acceptability, *appropriateness*, *responsiveness*, *legal* dan *equity*.

- d. *Administrative Operability*. Kriteria spesifik dalam administrative operability adalah *authority*, *institutional comitment*, *capability* dan *organitazional support*.

Penelitian tentang alternatif kebijakan ini perlu diperkuat dengan membandingkan dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini sebagai bentuk memperkuat dan memberikan nilai kebaruan dalam penelitian yang peneliti lakukan. *Pertama*, penelitian oleh Abidin tahun 2015 dengan judul Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa Dalam Mendukung Kebijakan Dan Desa. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah memiliki kesamaan dalam menganalisis kebijakan dana desa. Perbedaannya, terletak pada lokus penelitian dan teori yang digunakan, di mana peneliti menggunakan alternatif kebijakan publik sebagai analisis teoritiknya, sedangkan penelitian tersebut menggunakan teori desentralisasi fiskal dan keuangan desa. *Kedua*, penelitian berupa tesis tahun 2018 yang berjudul Analisis Implementasi Kebijakan Dana Desa di Kabupaten Mamuju Tengah oleh Aras. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah memiliki kesamaan dalam menganalisis kebijakan dana desa sebagai fokus penelitian. Perbedaan yang mendasar dalam penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah terletak pada lokus penelitian yaitu penelitian lebih spesifik di salah desa sedangkan penelitian tersebut terfokus pada satu kabupaten. Selain itu,

perbedaan lainnya terletak pada peneliti menggunakan alternatif kebijakan sebagai analisis teoritiknya sedangkan penelitian tersebut menggunakan implementasi kebijakan. *Ketiga*, penelitian tahun 2019 oleh Putram Irwandi, dan Andrizal yang berjudul Kebijakan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Muaro Jambi. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah memiliki kesamaan dalam fokus penelitian yaitu pada pengelolaan dana desa. Perbedaanannya jika dibandingkan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah terletak pada obyek penelitian, kemudian analisis teoritiknya serta metode penelitiannya di mana penelitian tersebut menggunakan pendekatan normatif dan empiris, sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan positivistik.

Secara umum penelitian yang berjudul Alternatif Kebijakan dalam Alternatif Kebijakan Dalam Pengelolaan Dana Desa Berbasis Potensi Di Desa Medewi, Kabupaten Jembrana Provinsi Bali, belum banyak yang menganalisis pengelolaan dana desa berbasis potensi desa. Setiap desa memiliki keunikan dan keunggulan komparatif-kompetitif dengan desa-desa lainnya. Oleh karena itu kajian penelitian ini semakin komprehensif karena memiliki relevansi terhadap potensi desa yang dimiliki, serta diperkuat melalui analisis teoritik melalui alternatif kebijakan. Hal ini semakin memberikan opsi atau pilihan bagi pemerintah Desa Medewi dalam mengambil keputusan di lingkup Desa Medewi.

METODE

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini, mengabungkan dua metode yaitu kuantitatif dan kualitatif. Hal ini lebih dikenal dengan *mixed methods*, dengan menggunakan desain *sequential explanatory*. Menurut Creswell *dalam* Rahma et al. (2016) menjelaskan bahwa penelitian ini dimulai dari metode kuantitatif yaitu dengan pengumpulan dan analisis data melalui teknik statistik deskriptif dan perhitungan indeks variabel. Statistik deskriptif digunakan untuk memperoleh ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data seperti mean, modus dan maximum atau minimum. Sedangkan perhitungan indeks variabel menggunakan net balance value yaitu persentase selisih jumlah responden yang menjawab setuju dan tidak setuju. Maka range indeks 0 – 200, di bawah 100 cenderung tidak setuju, di atas 100 cenderung setuju. Pernyataan-pernyataan terkait kebijakan yang sudah atau yang belum dilakukan menjadi hal yang dinilai melalui persepsi masyarakat Desa Medewi.

Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku usaha dan masyarakat Desa Medewi yang telah bekerja sebesar 2890. Maka setelah dihitung menggunakan rumus slovin dengan margin error 10 persen, diperoleh sampel 97 orang responden. Metode kuantitatif melalui survey dilakukan guna memperoleh persepsi masyarakat terkait kebijakan-kebijakan yang telah ada dan yang perlu dilakukan di Desa Medewi. Hasilnya survey tersebut maka menjadi landasan dalam melakukan wawancara atau cross cek data menggunakan metode kualitatif.

Tahapan selanjutnya dilakukan dengan analisis data kualitatif yang dibangun berdasarkan data analisis kuantitatif. Penulis melakukan wawancara mendalam terhadap

informan terpilih seperti kepala desa Medewi, ketua badan permusyawaratan desa Medewi, tokoh masyarakat dan pelaku usaha. Metode ini dipilih karena untuk menghasilkan kedalaman data dan makna serta cakupan yang luas terhadap suatu permasalahan di lingkup Desa Medewi. Permasalahan yang diungkapkan oleh informan menjadi acuan dalam mensinkronkan dengan data hasil survey sebelumnya, sehingga menghasilkan Analisa yang komprehensif dalam konteks alternatif kebijakan berbasis dana desa di Desa Medewi. Selain itu, Peneliti juga memperkuat dengan studi dokumentasi dalam menghasilkan analisis penelitian yang lebih mendalam. Berdasarkan metode tersebut menjadi bagian penting dalam menganalisis alternatif kebijakan yang terpilih nantinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi Desa Medewi

Desa Medewi memiliki potensi-potensi unggulan jika disbanding dengan desa lainnya di Kabupaten Jembrana. Salah satu keunggulan tersebut adalah adanya pantai medewi yang menjadi DTW (daya tarik wisata) Tirta di Kabupaten Jembrana. Pantai medewi cukup terkenal dikalangan surfer luar negeri karena pantai medewi secara geografis memiliki lekuk pantai yang indah, serta mudah diakses. Keistimewaan lainnya adalah ombaknya yang Panjang dan lama untuk pecah menjadi karakteristik yang cocok untuk kegiatan surfing. Kemudian karena berada pada Bali bagian barat, maka sangat cocok untuk menikmati sunset yang indah. Hal tersebut diperkuat dengan kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara ke obyek wisata pantai medewi. Pada tahun

2019 terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yaitu sekitar 8.556 jika dibandingkan pada tahun 2018, yaitu 4.224 wisatawan. Kondisi tersebut memberikan gambaran bahwa pantai medewi menjadi primadona khusus untuk wisata pantai di Kabupaten Jembrana (BPS Jembrana, 2020). Sedangkan untuk wisatawan nusantara yang berkunjung ke Pantai Medewi, justru terjadi penurunan. Pada tahun 2018 jumlah kunjungan wisatawan nusantara adalah 4.818 orang sedangkan tahun 2019 menjadi 4.279 orang. Kondisi tersebut bisa menjadi peluang dan ancaman, yaitu peluang dalam mendukung sentra ekonomi lainnya dalam menunjang pengelolaan Pantai Medewi, serta perlu adanya promosi yang intensi bagi wisatawan nusantara.

Pada tahun 2020, memang terjadi penurunan drastis terkait kunjungan wisatawa di Pantai medewi yaitu berkisar 500an orang wisatawan mancanegara dan nusantara. Kondisi ini, terjadi di semua obyek wisata di Bali karena adanya situasi pandemi Covid-19. Oleh karena itu, dengan penurunan sektor pariwisata di Desa Medewi maka menjadi peluang besar dalam mengembangkan pengelolaan potensi lainnya seperti pekebunan, pertanian, kelautan dan sektor lainnya menjadi sektor unggulan. Hal ini sangat diperlukan di tengah pandemi Covid-19 ini, karena pendapatan masyarakat Desa medewi yang sebelumnya hanya bergantung pada sektor pariwisata saja. Pengembangan potensi lainnya diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Medewi. Kebutuhan akan produk pertanian, perkebunan dan perikanan serta produk olahan lainnya selalu akan meningkat, apalagi di tengah situasi pandemi Covid-19

ini. Peran pemerintah Desa Medewi menjadi sangat krusial dalam mengantisipasi dari potensi dampak adanya pandemi Covid-19, terutama di sektor ekonomi, seperti rendahnya pendapatan masyarakat desa yang sebelum bekerja di sektor pariwisata, dan pengangguran. Adanya dana desa yang dialokasikan dari pemerintah pusat kepada setiap desa di Indonesia, termasuk juga di Desa Medewi, menjadi peluang yang besar dalam menstimulus pembangunan ekonomi berbasis desa. Desa harus mampu menggerakkan ekonomi masyarakatnya, kemudian mampu mendorong pertumbuhan ekonomi ke tingkat regional kabupaten hingga di tingkat Provinsi. Kondisi ini menjadi solusi ideal dalam menghadapi pandemi Covid-19, khususnya bagi Pemerintah Desa Medewi.

Potensi Desa Medewi khususnya pada sektor pertanian dan perkebunan menjadi sektor unggulan jika dibandingkan dengan desa-desa lainnya di Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana (lihat Tabel 2). Pentingnya potensi dalam peningkatan pembangunan di pedesaan khususnya bidang ekonomi. Potensi alam merupakan salah satu potensi unggulan karena hampir semua daerah khususnya di Bali memiliki pantai, area persawahan dan perkebunan yang masih terjaga dengan baik. Sektor pertanian dan perkebunan menjadi potensi selanjutnya yang penting dalam menunjang desa wisata dan pembangunan desa secara kesinambungan (Attar et al., 2013).

Tabel 2. Luas Lahan menurut Penggunaannya di Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana Tahun 2020

Desa/Kelurahan	Sawah (Ha)	Tegalan (Ha)	Perkebunan (Ha)
Medewi	201,08	441,27	97,81
Pulukan	56,33	612,29	118,22
Pekutatan	4,45	609,36	160,41
Pangyangan	11,33	602,10	106,17
Gumbrih	34,73	545,82	129,75
Pengeragoan	63,29	607,52	155,61
Asahduren		576,19	118,27
Menggisari		579,25	151,76

Sumber: BPS Jembrana, 2020.

Berdasarkan studi dokumentasi maka diperoleh data diatas, data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa potensi sektor pertanian dan perkebunan di Desa Medewi tergolong besar, khususnya di serta pertanian padi. Potensi Desa Medewi lainnya adalah pada sektor perikanan, yaitu dengan memiliki satu Balai kelompok nelayan, satu tempat pelelangan ikan, dan 153 perahu atau jukung (BPS Jembrana, 2020). Potensi tersebut

tentunya menjadi suatu keunggulan dibandingkan dengan desa lainnya, karena Desa Medewi menjadi desa berbatasan langsung dengan pantai dibandingkan desa lainnya di Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana. Selain itu, potensi pada sektor industri menempatkan Desa Medewi sebagai desa yang memiliki industri sedang terbanyak, yaitu sebesar 128 industri dilingkup desa. Potensi-potensi yang dimiliki

oleh Desa Medewi seharusnya sejalan atau mendorong pertumbuhan ekonomi di lingkup desa. Akan tetapi jika dibandingkan dengan

desa lainnya, pendapatan Desa Medewi masih belum maksimal (lihat Tabel 3)

Tabel 3. Pendapatan dan Belanja Desa di Kecamatan Pekutatan Tahun 2019

Desa/Kelurahan	Pendapatan desa (Rp)	Belanja Desa (Rp)	
		Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Bidang Pembangunan Desa
1. Medewi	3 711 042	1 122 931 636,00	1 325 589 434,00
2. Pulukan	3 825 964	974 994 570,92	880 057 403,00
3. Pekutatan	3 766 997	1 043 469 890,36	1 281 860 255,00
4. Pangyangan	2 921 742	839 896 750,00	858 310 106,00
5. Gumbrih	3 136 459	1 115 783 700,00	1 201 285 381,00
6. Pengeragoan	4 960 201	976 035 679,20	1 105 551 400,00
7. Asahduren	3 163 032	875 346 890,27	1 255 790 718,00
8. Manggisari	2 582 140	827 478 305,63	974 789 400,00
Jumlah	28 067 579	7 775 937 422,38	8 883 234 097,00

Sumber: BPS Jembrana, 2020.

Data pada Tabel 3 menunjukkan bahwa pendapatan Desa Medewi belum sejalan dengan potensi desa yang dimiliki. Jika dibandingkan dengan desa lainnya di Kecamatan Pekutatan, pendapatan Desa Medewi masih di bawah pendapatan beberapa Desa lainnya, secara potensi Desa Medewi lebih besar dibandingkn desa lainnya di Kecamatan pekutatan. Kondisi ini tentunya menjadi tantangan dalam memaksimalkan potensi desa melalui pengelolaan dana desa yang diperoleh Desa Medewi.

Pengelolaan dana desa pada Desa Medewi tentunya harus sejalan dengan peraturan dan kebutuhan masyarakat desa. Peraturan pada kementerian Desa tahun 2018, menjelaskan tentang prioritas

Pengelolaan dana desa. Adapun prioritas bidang pembangunan desa yaitu Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana desa, Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar, Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi desa, pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup, dan Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya.

Pengelolaan keuangan desa, di mana dana desa termasuk didalamnya merupakan menjadi kewenangan seorang kepala desa.

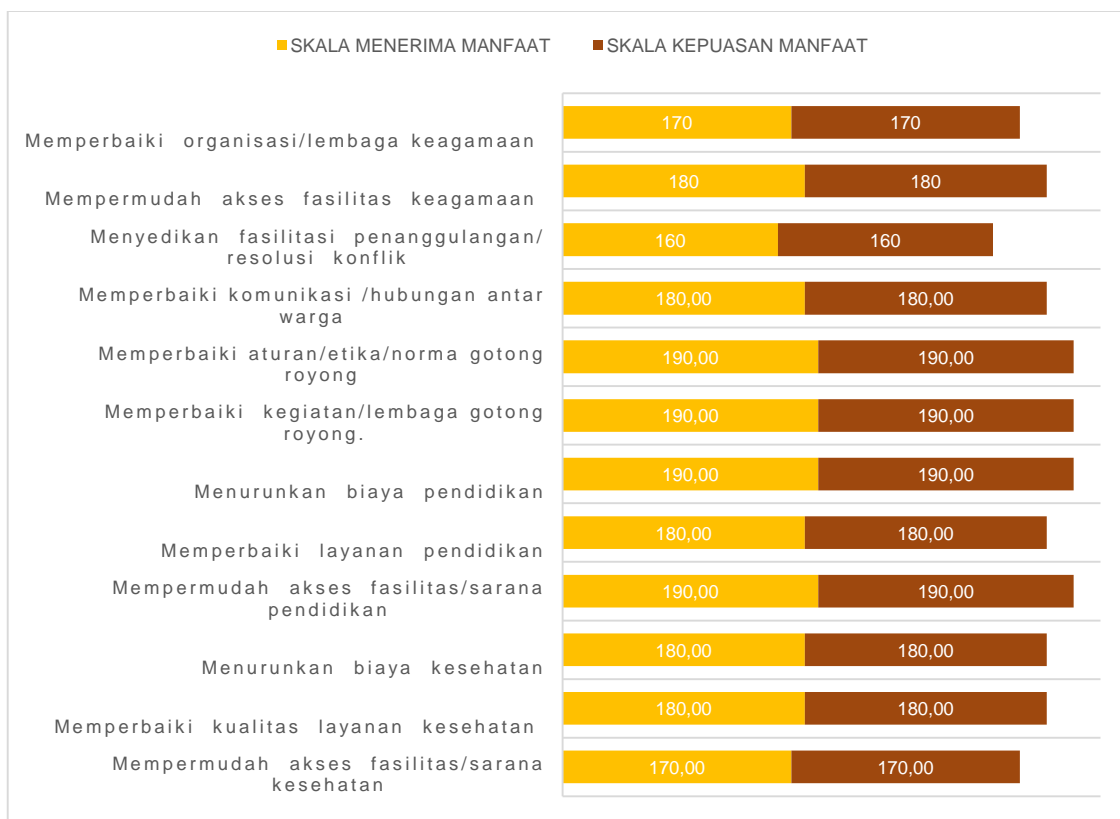
Pengelolaan tersebut harus tercermin dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan desa melalui penetapan APBDes yang diperkuat oleh peraturan desa (Mondale et al., 2017). Penetapan tersebut dilakukan oleh Kepala desa bersama badan permusyawaratan desa (BPD). Peran badan permusyawaratan desa dalam pengelolaan dana desa adalah sebagai pengawas agar dana desa tersalurkan sesuai dengan kepentingan masyarakat desa (Wijayanto & Sutjiatmi, 2018). Oleh karena bukan hanya peran Badan Permasyarakatan desa saja, tetapi juga peran serta seluruh lapisan masyarakat dilingkup desa menjadi penting dalam mengelola keuangan desa khususnya dana desa sejalan dengan kebutuhan masyarakat Desa Medewi secara luas dan jangka panjang.

Pengelolaan Dana desa menjadi bagian penting dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Ada beberapa prinsip atau norma dalam pelaksanaan APBDes, yaitu prinsip pelaksanaan keuangan desa, pelaksanaan penerimaan pendapatan, pelaksanaan pengeluaran atau belanja, dan pelaksanaan pembiayaan (Isnayanti et al., 2019). Prinsip-prinsip tersebut wajib terlaksana dengan baik dan benar sesuai dengan aturan serta sejalan dengan kebutuhan masyarakat desa. Selanjutnya, prinsip-prinsip tersebut harus dipertanggungjawabkan setiap akhir tahun

anggaran kepada camat sebagai perwakilan Bupati atau walikota di daerah.

Untuk prioritas pengelolaan dana desa pada bidang pemberdayaan masyarakat desa, yaitu peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar, pengelolaan sarana prasarana desa berdasarkan kemampuan teknik dan sumber daya lokal yang tersedia. Pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu bagian penting dalam otonomi desa yang tertuang dalam pasal 1 ayat 12 dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Firdaus et al., 2020). Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi, Penguatan dan fasilitasi masyarakat desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasanya lainnya, pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.

Pengelolaan dana desa di Desa Medewi tentunya harus sejalan dengan prioritas penggunaan dana desa seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Tentunya hal tersebut harus melalui musyawarah desa terlebih dahulu agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pada pengelolaan dana desa di Desa Medewi, maka perlu menganalisa persepsi masyarakat Desa Medewi terkait pengelolaan dana desa dalam bentuk pembangunan dan pemberdayaan yang telah dilakukan.



Sumber: data sekunder (diolah).

Gambar 2. Indeks Penerima Manfaat dan Kepuasan Pengelolaan Dana Desa

Data pada Gambar 2, berdasarkan Teknik analisis net balance value dengan range indeks 0 – 200, dimana nilainya mendekati 200 menunjukkan bahwa mayoritas responden setuju akan kepuasan dan manfaat yang dirasakan dalam kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan di Desa Medewi, Kabupaten Jembrana. Akan tetapi ada satu kegiatan yang perlu ditingkatkan yaitu terkait menyediakan fasilitas penanggulangan atau resolusi konflik. Memang jika melihat secara sosiologis di Desa Medewi cenderung heterogen yaitu masyarakat beragama hindu dan muslim cukup berimbang tetapi mereka hidup saling berdampingan. Selama ini memang tidak ada kejadian yang berpotensi menimbulkan konflik sosial.

Prioritas lainnya yang menjadi penting dalam pengelolaan dana desa adalah terkait dengan pengembangan ekonomi desa dan perbaikan atau pembangunan sarana dan prasarana di lingkup desa. Setelah melakukan survey kepada kelompok masyarakat menunjukkan bahwa pengalokasian dana desa khususnya dalam memperbaiki ekonomi lain dirasa masih lemah dari segi manfaat dan kepuasan masyarakat. Kemudian kegiatan lainnya yang dirasa masih rendah adalah kegiatan dalam memperbaiki perilaku masyarakat di Desa Medewi. Hal ini sebagai rekomendasi diperlukannya kegiatan berupa pembinaan masyarakat yang berorientasi dalam memperbaiki perilaku masyarakat desa. Jika dilihat data penggunaan dana desa khususnya pada tahun 2018 terlihat bahwa

tidak ada kegiatan pembinaan yang dilakukan. Hal tersebut juga terjadi pada tahun 2017, sehingga penggunaan dana desa kedepannya perlu mengalokasikan pada kegiatan pembinaan kepada masyarakat Desa Medewi.

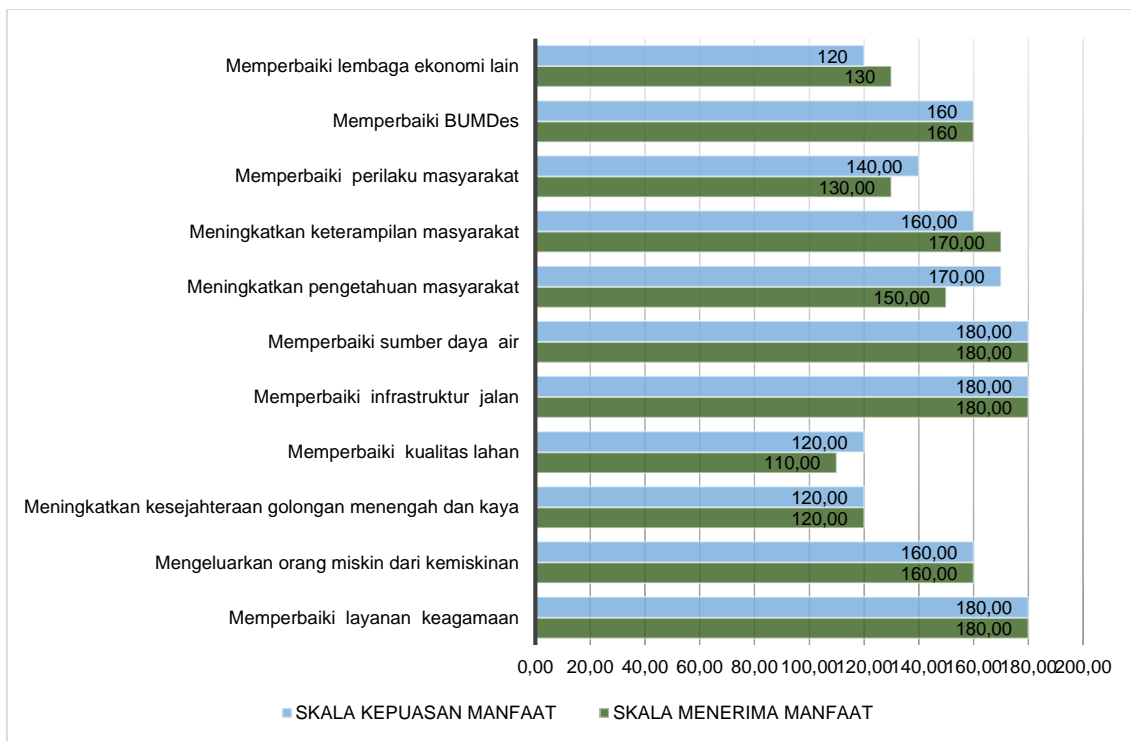
Tabel 4. Penggunaan Dana Desa di Desa Medewi pada Tahun 2015-2018 (dalam Rp)

	2015	2016	2017	2018
Pemerintahan Desa				
Pembangunan Desa	191.897.000,00	517,715,076	789,527,150.00	359,664,700.00
Pembinaan Masyarakat	53.809.000,00	120,500,000.00		
Pemberdayaan masyarakat		6,987,959.00	48,734,000.00	40,293,500.00

Sumber: Pemerintah Desa Medewi, 2019.

Hal lainnya yang masih kategori rendah dari aspek manfaat dan kepuasan dari masyarakat adalah kegiatan memperbaiki kualitas lahan. Sebagian lahan di Desa Medewi terbagi dalam lahan pertanian dan perkebunan (Kusuma, 2014), dengan komoditi unggulan yaitu kelapa dan padi. Perbaikan lahan menjadi hal yang penting karena Desa

Medewi memiliki Bumdes Dewi Lestari. Bumdes tersebut membeli gabah petani lokal di Desa Medewi kemudian dikeringkan dengan kadar air yang cukup rendah dan digiling untuk menghasilkan beras lokal yang dijual kepada masyarakat (Astawa, 2019).



Sumber: data sekunder (diolah).

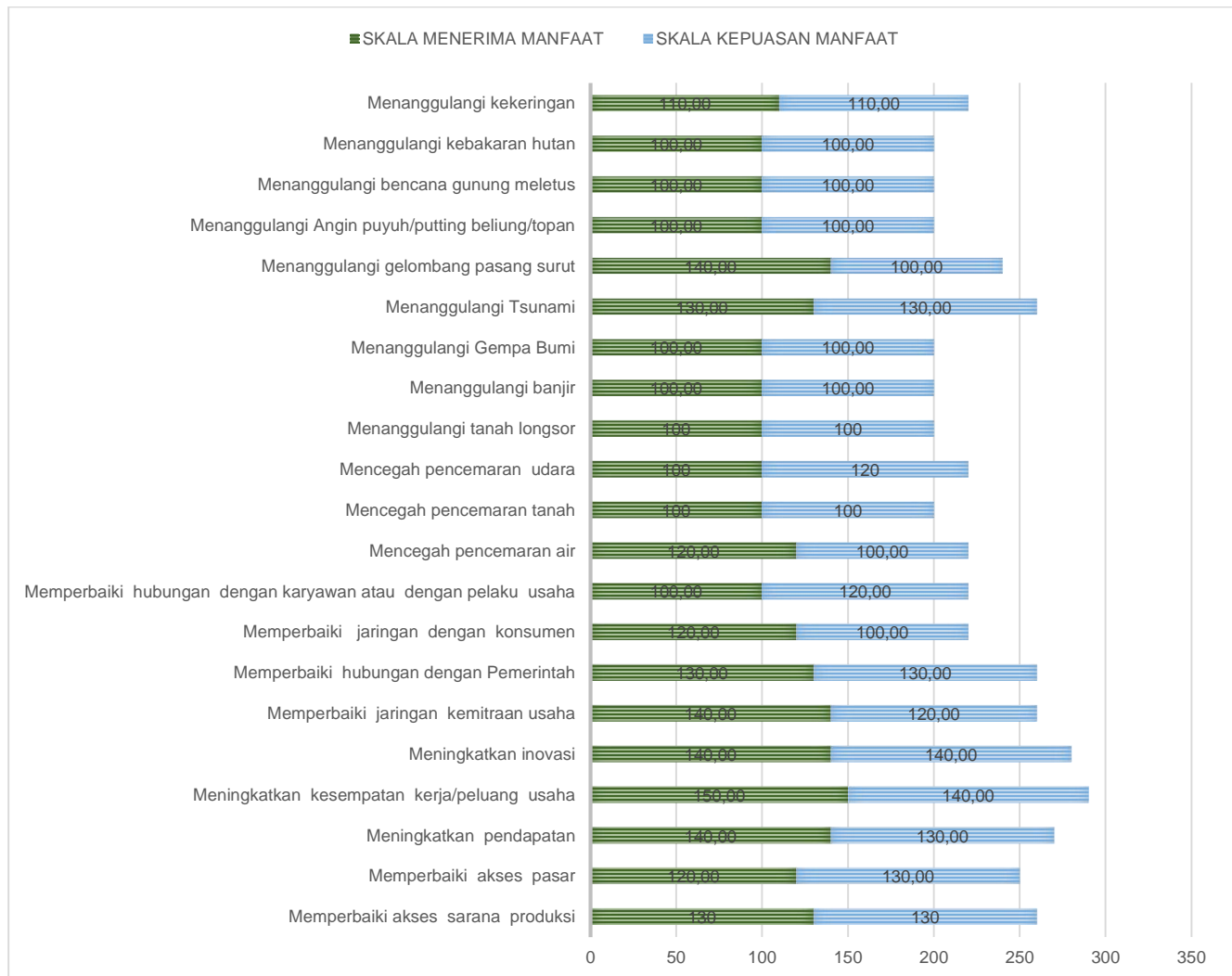
Gambar 3. Indeks Penerima Manfaat dan Kepuasan Pengelolaan Dana Desa

Data pada Gambar 3, berdasarkan Teknik analisis net balance value dengan range indeks 0 – 200, jika di bawah 100 cenderung tidak setuju dan jika di atas 100 cenderung setuju. Maka dari data diatas terdapat dinamika penilaian dari responden terdapat beberapa variable dari aspek kepuasan dan kebermanfaatan. Terdapat beberapa kegiatan yang masih tergolong rendah dalam menciptakan kebermanfaatan dan dan kepuasan masyarakat desa. Salah satunya adalah kegiatan memperbaiki kualitas lahan. Kondisi tersebut menjadi indikasi bahwa pembangunan sektor pertanian secara umum, belum menjadi prioritas utama atau kegiatan yang dilakukan belum sesuai harapan masyarakat desa. Hal ini menjadi tantangan besar, karena potensi utama Desa Medewi adalah sektor pertanian. Apalagi disituasi pandemi Covid-19 ini, sektor pertanian

menjadi sektor andalan dalam meningkatkan perekonomian warga dan pemerintah Desa Medewi.

Pengalokasian dana desa harus sejalan dengan kebutuhan pada masyarakat desa dan pengembangan potensi desa. Berdasarkan indikator masing-masing indeks desa membangun ada yang kurang relevan untuk dipakai sebagai acuan dalam menilai pengelolaan dana desa. Kondisi tersebut terjadi di Desa Medewi, di mana ada beberapa indikator yang sulit untuk dipakai dalam menilai, misalnya menanggulangi kebakaran hutan, menanggulangi bencana gunung meletus dan bencana alam lainnya. Hal ini disebabkan karena secara geografis Desa Medewi berada pada pinggir pantai. Sehingga kedepannya perlu kegiatan yang bersumber dari dana desa untuk

pengembangan wilayah pantai dan menanggulangi tsunami lebih diutamakan.



Sumber: data sekunder (diolah).

Gambar 4. Indeks Penerima Manfaat dan Kepuasan Pengelolaan Dana Desa

Data diatas merupakan hasil penilaian terhadap persepsi dengan menggunakan Teknik analisis net balance value dengan range indeks 0 – 200, jika di bawah 100 cenderung tidak setuju dan jika di atas 100 cenderung setuju. Pada Gambar 4 menunjukkan bahwa beberapa variabel terkait dengan pelestarian lingkungan masih rendah dalam memberikan kebermanfaatn dan kepuasan bagi Masyarakat Desa Medewi. Hal ini perlu menjadi bagian

evaluasi kinerja pmerintah Desa, karena faktor lingkungan hidup dapat berdampak pada beberapa kondisi sosial dan ekonomi. Sedangkan variabel yang berkaitan dengan sektor ekonomi, seperti jaringan kemitraan usaha, inovasi, kesempatan atau peluang kerja, peningkatan pendapatan, akses pasar dan akses sarana produksi masih perlu dioptimalkan lagi. Kondisi ini menjadi penting di tengah situasi pandemi Covid-19, di mana sektor pariwisata di Bali secara

Alternatif Kebijakan Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Pemerintah Desa Medewi, Kabupaten Jembrana
Provinsi Bali

(I Putu Dharmanu Yudartha)

umum menjadi lumpuh maka perlu mengoptimalkan sektor lainnya. Potensi Desa Medewi yang kuat terkait dengan pertanian dan perikanan harus menjadi prioritas dalam pembangunan desa, terkait dengan membangun kemitraan dengan swasta dalam pengelolaan hasil pertanian dan perikanan, peluang usaha bagi masyarakat desa di sektor pertanian dan perikanan, kemudian berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat, memperkuat pasar desa dalam menjual produk pertanian dan perikanan dan sarana produksi pengolahan produk pertanian dan perikanan. Sektor perikanan perlu dioptimalkan karena sektor ini berpotensi menimbulkan kemiskinan, karena nelayan secara khusus sangat bergantung pada kemampuan dan sarana yang dimiliki serta modal yang dibutuhkan untuk operasionalnya (Tobarasi, 2019).

Peran Bumdes dalam pengelolaan dana desa menjadi faktor penting, karena sebagai pendorong pertumbuhan perekonomian desa, oleh karena itu perlu dioptimalkan kinerjanya. Jika dilihat berdasarkan prioritas penggunaan dana desa memang telah dialokasikan. Sisi yang lain, masyarakat Desa Medewi juga merasakan manfaat dan kepuasan dalam pemberdayaan dan pengembangan Bumdes yang dilakukan pemerintah desa. Badan Usaha Milik Desa harus mampu inovatif dan kreatif dalam menunjang pembangunan Desa Medewi, khusus di sektor Ekonomi. Saat ini peran Bumdes Desa Medewi masih sebatas membeli gabah dari petani lokal kemudian menjual Beras lokal kepada masyarakat di lingkup Kabupaten Jembrana. Hal ini perlu dukungan dari pemerintah Desa Medewi, agar sektor pertanian lainnya seperti kelapa,

cacao dan hasil perkebunan lainnya mampu diolah oleh Bumdes serta masyarakat Desa Medewi. Tujuannya agar mampu menghasilkan barang produksi atau barang olahan bukan sekedar bahan mentah saja. Selain itu sektor perikanan perlu dimaksimalkan juga menjadi produk olahan. Kebijakan inilah yang perlu menjadi prioritas dalam pengelolaan dana Desa di Desa Medewi Kabupaten Jembrana.

Rekomendasi Alternatif Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi

Pengelolaan dana desa di Desa Medewi perlu dioptimal berbasis pada potensi desa. Desa Medewi memiliki potensi dalam sector pariwisata dan sector pertanian yang dikelola dengan optimal. Hal ini disebabkan oleh dukungan dana desa lebih pembangunan desa tetapi belum secara spesifik dalam pembangunan sumber daya manusia melalui pembinaan, pemberdayaan dan pelatihan di desa Medewi. Permasalahan lainnya, pengelolaan dana desa belum memberikan nilai tambah dari sector ekonomi misalnyya Bumdes atau unit usaha lainnya di Desa Medewi. Oleh karena itu perlu mengkaji secara mendalam alternatif-alternatif kebijakan yang ideal. Berdasarkan hasil analisis terkait pengelolaan dana desa berbasis potensi desa pada Desa Medewi adalah sebagai berikut :

1. Hanya mengandalkan sektor pariwisata sebagai obyek unggulan, padahal sektor pertanian khususnya persawahan memiliki potensi besar;
2. Belum optimalnya pengelolaan Bumdes di Desa medewi, terkait pembelian hasil gabah petani.

3. Kurangnya pengolahan produk-produk olahan dari sektor pertanian dan perikanan di Desa Medewi.

Permasalahan dan tantangan di atas menjadi dasar peneliti untuk menganalisis

alternatif kebijakan dalam mengatasinya. Alternatif-alternatif tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Identifikasi Alternatif Kebijakan

Kriteria	Alternatif Kebijakan		
	Peningkatan kemudahan akses modal usaha di sektor pariwisata dan pertanian oleh pemerintah Desa	Meningkatkan intensitas pembinaan masyarakat dalam pengolahan sektor pertanian dan perikanan	Mengoptimalkan potensi desa melalui pengembangan Ekowisata di beberapa obyek wisata
Dampak Kebijakan (Technical feasibility)	<ul style="list-style-type: none"> - Memberdayakan masyarakat, - Meningkatkan pendapatan masyarakat dan secara tidak langsung berkontribusi kepada daerah. - Mendorong terciptanya <i>multifier effect</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Menghasilkan produk-produk industri olahan berbasis rumah tangga yang kompetitif. - Pemerataan pertumbuhan ekonomi karena tidak lagi berbasis di kota. - Kontribusi terdapat pendapatan warga desa khususnya petani dan memberdayakan BUMDes di Desa Medewi; - Membangun Perekonomian kerakyakatan sebagai menuju kategori desa mandiri 	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi daya Tarik baru terhadap pariwisata yang memadukan dengan pendidikan. - Menjaga kelestarian kawasan obyek wisata. - Peningkatan kunjungan wisatawan dan kontribusi terhadap pendapatan pelaku usaha di Desa Medewi
Ekonomi (Economic and Financial Possibility)	<ul style="list-style-type: none"> - Butuh dana yang cukup besar. - Perlu perlibatan sektor swasta seperti BANK. - Perlu pengawasan terhadap kelayakan usaha. 	<ul style="list-style-type: none"> - Butuh dana yang cukup besar melalui dana desa terkait sosialisasi kemudian pelatihan di bidang usaha pertanian. - Perlu perlibatan praktisi dibidang kewirausahaan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Membutuhkan banyak biaya terkait membuat kajian ekowisata di salah satu obyek wisata. - Membutuhkan SDM yang kompeten dalam hal ini.
Politis (Political Viability)	<ul style="list-style-type: none"> - Sangat diterima atau dibutuhkan masyarakat. - Butuh Aturan berupa peraturan desa 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat diterima Masyarakat; - Butuh kesepatan bersama dalam menentukan bentuk dan fokus pembinaannya 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat diterima masyarakat; - Butuh aturan dalam penetapan ekowisata di obyek wisatanya
Pelaksana (Administrative Operability)	Pemerintah Desa, Bumdes, Perbankan	Pelaku usaha, pemerintah desa, Bumdes dan Dinas terkait	Pemerintah Desa, masyarakat sekitar obyek wisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Jembrana dan pelaku usaha pariwisata.

Sumber: data primer (diolah).

Berdasarkan tabel 5, terdapat tiga alternatif kebijakan yang relevan untuk diimplementasikan di Desa Medewi Kabupaten Jembrana. Tentunya alternatif-alternatif kebijakan tersebut sesuai dengan esensi dalam pengelolaan dana desa yang berfokus pada pengelolaan potensi desa. Alternatif kebijakan pertama adalah kemudahan akses modal usaha di sektor pariwisata dan pertanian oleh pemerintah Desa. Alternatif kebijakan ini memiliki kelebihan yaitu pelaku usaha di bidang pariwisata dan pertanian dipermudah dalam mendapatkan pinjaman modal melalui Bumdes Desa Medewi, mampu mendorong pertumbuhan ekonomi desa dengan munculnya kegiatan-kegiatan usaha baru di bidang pariwisata dan ekonomi, dan mendorong lapangan kerja baru bagi masyarakat Desa Medewi. Sisi yang lain alternatif kebijakan terkait Kemudahan akses modal usaha di sektor pariwisata dan pertanian oleh pemerintah Desa memiliki beberapa kelemahan. *Pertama*, sektor pariwisata di Bali secara umum mengalami penurunan yang sangat signifikan ditengah pandemic Covid-19. Oleh karena itu kebijakan tersebut akan terhambat secara efektivitasnya dan dampaknya kepada masyarakat Desa Medewi. *Kedua*, butuh kerjasama dengan pihak-pihak lainnya seperti Bank karena prioritas dana desa tidak dapat secara maksimal dipergunakan dalam permodalan usaha.

Alternatif kebijakan yang kedua adalah pembinaan masyarakat dalam pengelolaan sektor pertanian dan perikanan. Kebijakan ini memiliki kelebihan dalam jika dilakukan implementasi kebijakan nantinya. *Pertama*, kebijakan ini sesuai dengan potensi Desa Medewi yang belum dioptimalkan dan memiliki potensi yang besar yaitu pertanian dan perikanan. *Kedua*, kebutuhan akan komoditi sektor pertanian dan perikanan ditengah situasi pandemic

Covid-19 bisa dikatakan tetap stabil dan cenderung meningkat. *Ketiga*, memberikan pemberdayaan melalui peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan produksi sektor pertanian dan perikanan, beserta produk olahannya. Akan tetapi di sisi yang lain terdapat beberapa kelemahan atau kekurangan dalam implementasi kedepannya. *Pertama*, pembinaan kepada masyarakat butuh proses yang tidak tentu tergantung dari kapasitas dan kapabilitas dari bidang pembinaan dan pemahaman masyarakat Desa Medewi. *Kedua*, butuh kesinambungan dan keberlanjutan, yaitu target dan sasaran yang jelas serta metode yang sesuai.

Alternatif kebijakan yang ketiga adalah pengembangan ekowisata di beberapa obyek wisata. Adapun alternatif kebijakan ini lebih memfokuskan pada pengembangan pariwisata tetapi lebih berwawasan lingkungan dengan menerapkan nilai konservasi alam, pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal dan pembelajaran serta Pendidikan kepada wisatawan dan masyarakat sekitar. Tentunya ada kelebihan dalam alternatif kebijakan tersebut. *Pertama*, memberikan konsep baru dan inovatif dalam daya Tarik wisata, dinamakan Desa Medewi memiliki potensi yang sangat mendukung dalam implementasi ekowisata. *Kedua*, menjaga kelestarian alam, menghindari alih fungsi lahan pertanian dan perkebunan. *Ketiga*, alternatif kebijakan ini bersifat *multi layers*, artinya berdampak kepada sektor-sektor yang lain seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi dari sektor wisata, pertanian, perkebunan, dan perikanan. Akan tetapi tentu ada kekurangan dalam alternatif kebijakan tersebut. *Pertama*, kurang relevan dengan situasi pandemic Covid-19, karena rendahnya kunjungan wisatawan

nusantara dan mancanegara di Bali. *Kedua*, membutuhkan kajian terlebih dahulu dalam menentukan konsep ekowisata untuk diterapkan di beberapa obyek wisata di Desa Medewi.

Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan langkah-langkah awal dalam pengelolaan dana desa berbasis potensi di Desa Medewi. Kebijakan tersebut diharapkan; *Pertama*, meningkatkan pertumbuhan ekonomi Desa Medewi melalui perdagangan, hotel dan restoran. Karena dengan semakin tumbuhnya sektor usaha masyarakat serta melibatkan Bumdes di Desa Medewi dalam mempromosikan dan pemasaran. Produk olahan jelas mempunyai nilai tambah yang cukup tinggi daripada produk-produk mentah dan juga mampu bersaing secara kompetitif dengan produk olahan lainnya di tingkat regional di Provinsi Bali. *Kedua*, membangkitkan perekonomian yang “sehat” artinya perekonomian yang berbasis pada rumah tangga sehingga pertumbuhan ekonomi nantinya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Desa Medewi secara keseluruhan. Jika pertumbuhan ekonomi banyak difokuskan pada sektor investasi dan industri maka keuntungan lebih banyak terserap ke luar Desa Medewi. Memang investasi dan industri penting dalam pembangunan ekonomi desa kedepan, tetapi alangkah tepatnya jika dimulai dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dapat memberdayakan (*empowering*) masyarakat. *Ketiga*, Memberikan daya Tarik baru dalam pariwisata Desa Medewi dengan mendorong wisatawan ikut serta menjaga, melestarikan dan memberi edukasi. Kelestarian alam dari obyek wisata merupakan tantangan kedepan karena ada kecenderungan pengembangan obyek wisata justru merusak lingkungan, flora dan fauna. Pengembangan ekowisata dapat

dilakukan di daerah yang rentan akan kerusakan, khususnya di area pantai Medewi.

Berdasarkan analisis dari tiga alternatif kebijakan maka peneliti menentukan bahwa alternatif kebijakan kedua tentang pembinaan masyarakat dalam pengolahan sektor pertanian dan perikanan menjadi kebijakan ideal. Pertimbangan peneliti tentunya berdasarkan empat kriteria yang dipakai berdasarkan pemikiran patton dan sawicky, serta relevansi dengan situasi saat ini dimana ditengah pademi Covid-19, sektor pertanian dan perikanan cenderung lebih stabil dalam memenuhi kebutuhan dan mendorong pertumbuhan ekonomi Desa Medewi. Adapun Langkah selanjutnya adalah melakukan sosialisasi melalui pemerintah Desa Medewi yang meliputi tiga aspek. Aspek pertama adalah perumusan kebijakan dengan melibatkan aparat desa, badan permusyawaratan desa, tokoh desa, pelaku usaha dan perwakilan masyarakat desa. Perumusan kebijakan dalam pembinaan masyarakat harus sejalan dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Desa Medewi. Aspek yang kedua adalah kejelasan kelompok sasaran. Sasaran kebijakan ini menjadi penting agar secara spesifik dan langsung dapat dirasakan masyarakat. Selain itu agar kebijakan menjadi tepat dengan tujuan kebijakan nantinya. Aspek yang ketiga adalah aktor pelaksana kebijakan. Perumusan kebijakan perlu menentukan aktor pelaksana kebijakan yang memiliki kapabilitas dan tanggungjawab serta dapat dipercaya oleh masyarakat. Selain itu, menjelaskan tentang kewenangan yang diberikan kepada setiap aktor-aktor pelaksana kebijakan. Hal ini bertujuan agar pada tahap implementasi kebijakan nantinya dapat sesuai dan sejalan dengan tujuan kebijakan dan tepat sasaran.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Medewi masih belum sesuai dengan potensi yang dimiliki. Sektor pertanian dan perikanan perlu dioptimalkan selain sebagai komoditi perdagangan tetapi juga mampu mengolah produk pertanian dan perikanan. Oleh karena itu, salah satu alternatif kebijakan menjadi relevan dalam menjawab permasalahan di Desa Medewi. Menurut peneliti, kebijakan terkait pembinaan masyarakat dalam pengolahan sektor pertanian dan perikanan menjadi kebijakan ideal. Hal ini disebabkan memiliki kekuatan di aspek ekonomi dan dampak kebijakan secara jangka Panjang dalam pengolahan sektor pertanian dan perikanan. Aspek ekonomi yang dimaksud adalah dukungan dari dana desa dan bermanfaat pada peningkatan perekonomian desa, sedangkan dampak kebijakan lebih kepada mampu menghasilkan keterampilan bagi masyarakat. Implikasi dari kebijakan yang terpilih yaitu pembinaan masyarakat dalam pengelolaan sektor pertanian dan perikanan memberikan implikasi yang signifikan dalam meningkatkan kemampuan masyarakat desa dalam mengolah berbasis produksi skala kecil dan menengah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Udayana sebagai pihak yang telah mengalokasikan dana penelitian, Rekan dosen program studi administrasi publik FISIP Universitas Udayana yang telah banyak membantu dalam penelitian, dan aparat serta masyarakat Desa Medewi yang telah banyak membantu sebagai informan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Sutoro, et al (2014). *Desa membangun Indonesia*. Yogyakarta: FPPD.
- Gunawan H, Daddi, Achdian, Andi. Yulianto, Bayu A. (2013). *Jalan baru otonomi desa: Mengembalikan otonomi masyarakat*. Jakarta: Kemitraan.

Jurnal

- Ardianti, S. (2017). Pengaruh kunjungan wisata terhadap pendapatan masyarakat di desa medewi, kecamatan pekutatan, kabupaten jembrana tahun 2012-2015. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 9(1), 198-206.
<https://doi.org/10.23887/jjpe.v9i1.20005>
- Attar, M., Hakim, L., & Yanuwiadi, B. (2013). Analisis potensi dan arahan strategi kebijakan pengembangan desa ekowisata di kecamatan bumiaji – kota batu. *Journal of Indonesian Tourism and Development Studies*, 1(2), 68–78.
- Firdaus, R., Prayugo, & Huda, N. (2020). Pemanfaatan dana desa dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa di desa ulu pulau. *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, 1(1), 69–77.
- Isnayanti, K., Maherni, L. B. S., & Irayani, M. P. (2019). Dampak akuntabilitas pemerintahan desa terhadap pengelolaan alokasi dana desa (Studi kasus Desa Jagaraga). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 7(2), 109–121.
<https://doi.org/10.23887/jinah.v7i2.19961>
- Kusuma, P. G. W. (2014). Pengaruh perubahan penguasaan lahan pertanian terhadap tingkat eksistensi subak di Desa Medewi Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana. *Jurnal Pendidikan Geografi*, 2(1), 1–16.
<http://dx.doi.org/10.23887/jjpg.v2i1.20373>

- Meutia, I. (2017). Pengelolaan keuangan dana desa. *Jurnal akuntansi multiparadigma*, 8(2), 336–352. <http://dx.doi.org/10.18.202/jamal.2017.08.7058>
- Mondale, T. F., Aliamin, A., & Fahlevi, H. (2017). Analisis problematika pengelolaan keuangan desa (Studi Perbandingan pada Desa Blang Kolak I dan Desa Blang Kolak II, Kabupaten Aceh Tengah). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(2), 196–212. <https://doi.org/10.24815/jped.v3i2.8231>
- Mualim. (2010). Analisis kebijakan penataan pedagang kaki lima (pkl) di simpang lima kabupaten pati. *Dialogue*, 5(1), 35–53.
- Nufaisal, M. dwi. (2016). Akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur di desa tegalrejo kecamatan gedangsari kabupaten gunungkidul tahun 2016. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 05(01), 58–72. <http://journal.unpad.ac.id/cosmogov/article/view/18432>
- Rahma, A. D., Sulhadi, & Sumarni, S. S. (2016). Implementasi Pembelajaran Sains dengan Media Fotonovela untuk Meningkatkan Motivasi Belajar siswa SD/MI. *Journal of Primary Education*, 5(1), 1–9. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jpe/article/view/12886>
- Ramly, A. R., & Mursyida, J. W. (2017). Peningkatan potensi desa (studi kasus kec kuala kabupaten nagan raya). *Seminar Nasional II USM 2017*, 1, 379–392.
- Sidik, F. (2015). Menggali potensi lokal mewujudkan kemandirian desa. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 19(2), 115-131. <https://doi.org/10.22146/jkap.7962>
- Tobarasi, I. (2019). Analisis alternatif kebijakan perikanan dalam meningkatkan pendapatan nelayan di Kabupaten Konawe. *Kybernan: Jurnal Studi Pemerintahan*, 5(2), 29–40. <https://doi.org/10.35326/kybernan.v5i2.403>
- Wijayanto, T., & Sutjiatmi, S. (2018). Analisis efektivitas pengawasan badan permusyawaratan desa terhadap penggunaan dana desa tahun 2015-2016 Desa Lebakbarang Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan. *INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL (Kajian Politik – Pemerintahan)*, 1(1), 1–10.

Tesis

- Aras, A. (2018) Analisis implementasi kebijakan dana desa di Kabupaten Mamuju Tengah. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Sumber Digital

- Tulus, B.Y. (2019, Agustus 16) Presiden Jokowi puji DPR setuju Rp 70 triliun dana desa untuk 2019 diperoleh tanggal 3 November 2020, dari <https://www.merdeka.com/uang/presiden-jokowi-puji-dpr-setujui-rp-70-triliun-dana-desa-untuk-2019.html>.
- Badan Pusat Statistik (2020, Desember 4). Kabupaten Jembrana dalam angka tahun 2020 diperoleh tanggal 5 Maret 2021 dari <https://jembranakab.bps.go.id/publication/download.html>.

Sumber lainnya

- Ramly, A.R., & Mursyida, J.W. (2017). Peningkatan potensi desa (Studi kasus Kec Kuala Kabupaten Nagan Raya). *Seminar nasional II USM 2017*, 1, 379–392.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).